



Tantangan Pembangunan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Andi Pramaria*¹, Gusti Bagus Kertayasa², Lalu Agustian Kusumaredi³

¹Widyaiswara Ahli Utama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

²Fungsional Penataan Kependudukan dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Provinsi NTB

³Fungsional BKKBN Perwakilan NTB

Ringkasan

Kata kunci:
pengendalian penduduk,
bonus demografi,
peningkatan IPM

Pembangunan kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum mencapai kondisi yang diinginkan, yang ditandai oleh laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, kepadatan penduduk yang belum merata, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah. Meskipun bonus demografi sudah dicapai, namun jika tidak disertai oleh tingkat produktivitas yang tinggi maka windows of opportunity akan tetap sulit diraih. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang strategi pembangunan kependudukan yang sesuai dengan kondisi wilayah Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah desk research dengan menggunakan data resmi hasil Sensus Penduduk 2020 serta diskusi dengan stakeholder. Hasil kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,63% sedangkan Nasional 1,25%, Dependency Ratio 48,66, kepadatan penduduk pulau Lombok 756,86 jiwa/km² dan pulau Sumbawa 99,77 jiwa/km², dan nilai IPM mencapai 68,25, dimana nilai ini berada di ranking 29 dari 34 provinsi. Tantangan utama dalam pembangunan kependudukan pada masa mendatang adalah pengendalian penduduk, pemanfaatan bonus demografi, pemerataan penduduk, dan peningkatan IPM. Diperlukan strategi pembangunan kependudukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Abstract

Keywords:
population control,
demographic bonus,
increase in HDI

The population development of West Nusa Tenggara Province has a high population growth rate, uneven population density, and low Human Development Index (HDI). Although the demographic bonus has been achieved, the windows of opportunity were still difficult to be achieved. The purpose of this study was to design a population development strategy based on the West Nusa Tenggara region. The method used was desk research, with restrospective data from the goverments' 2020 Population Census and discussions with stakeholders. The results of the study showed that the population growth rate reached 1.63% while the National was 1.25%. The Dependency Ratio was 48.66, the population density of Lombok is 756.86 people/km² and Sumbawa was 99.77 people/km². HDI value was 68.25 with rank 29 among 34 provinces. The main challenges in population development in the future are population control, improvement of population's capacity building, utilization of demographic bonuses, population distribution improvement, improving education, health and mobility of a productive population to increase HDI. The population development strategies is needed to achieve the desired conditions.

Corresponding Author: **Andi Pramaria**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Singosari No 2 Mataram.

Email: dinasp3ap2kbntb@gmail.com.

PENDAHULUAN

Komponen penting suatu negara atau wilayah adalah penduduk yaitu sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu dengan batas-batas geografis yang tertentu pula. Aktivitas, kualitas dan kuantitas penduduk, akan sangat mempengaruhi kondisi suatu negara atau wilayah karena kondisi suatu negara atau wilayah akan sangat ditentukan oleh kondisi penduduknya. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Jumlah penduduk tersebut telah menempatkan pada peringkat keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat (Worldometers, 2019). Jumlah penduduk yang besar, akan bermanfaat jika mempunyai kualitas yang baik, tetapi sebaliknya akan menjadi beban pembangunan jika berkualitas rendah atau menjadi penduduk yang tidak produktif. Nilai produktivitas penduduk rata-rata, diukur dari tingkat *output* yang dihasilkan dalam waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa dibarengi perencanaan yang tepat, serta peningkatan kualitas penduduk akan berdampak pada permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Penduduk yang besar akan memerlukan ruang dan lapangan pekerjaan yang luas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Jalaludin Irwan Suriadi (2021), untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui aktivitas migrasi atau mobilitas penduduk, perlu dilakukan (1) kebijakan mobilitas penduduk diarahkan untuk pemerataan persebaran penduduk yang sesuai kondisi dan potensi daerah, (2) mengidentifikasi karakteristik dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, (3) peningkatan eskalasi pembangunan ekonomi di pulau Sumbawa, dan (4) transmigrasi lokal dan transmigrasi swakarsa.

Besarnya tekanan penduduk perlu dikendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan perlu diarahkan dan direncanakan sejalan dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori ekonomi klasik yang antara lain dimotori oleh Adam Smith, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi banyak disebabkan oleh berkembangnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pasar dan meningkatkan prevalensi permintaan barang dan jasa sehingga akan mendorong produksi serta spesialisasi

pada kegiatan ekonomi dan akan bertambah tinggi. Namun demikian, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas maka akan menjadi beban negara. Sementara menurut Boediono *dalam* Tarigan (2014), pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk agar kesejahteraan yang ditunjukkan oleh meningkatnya PDRB perkapita akan menjadi lebih nyata.

Ricardo dan Malthus *dalam* Sukirno (2017) menyampaikan pandangan pesimis terhadap berakhirnya proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Perekonomian suatu negara pada suatu waktu akan mencapai kondisi *stagnant* atau *stationary state* yaitu keadaan dimana perekonomian tidak berkembang. Pandangan Smith dengan Ricardo dan Malthus yang berbeda disebabkan pada pandangan mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Smith berpendapat bahwa pertambahan penduduk akan menjadi dorongan berlangsungnya pembangunan ekonomi karena akan meningkatkan permintaan dan berkembangnya pasar. Pendapat tersebut disebabkan belum disadarinya "*hukum hasil lebih yang makin berkurang*". Sementara Ricardo dan Malthus, berpendapat bahwa berkembangnya jumlah penduduk yang cepat sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan menjadi dua kali lipat dalam satu generasi, justru akan menurunkan kembali proses pembangunan ke level yang lebih rendah. Untuk mendapatkan manfaat yang tinggi dari perkembangan jumlah penduduk, maka diperlukan peningkatan produktivitas yang diindikasikan oleh besarnya output dibandingkan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas penduduk yang lebih tinggi.

Kualitas penduduk yang diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan akumulasi dari nilai komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Besaran IPM akan menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil-hasil pembangunan dan kondisi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat (Menko Kesra, 2012). Komponen pendidikan diindikasikan oleh nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), nilai komponen kesehatan diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), sedangkan nilai komponen ekonomi diukur dari rata-rata kemampuan daya beli masyarakat.

Produktivitas penduduk diperoleh dari hasil aktivitas penduduk. Menurut Arsyad, Lincoln (2020) produktivitas penduduk dapat diukur melalui pendekatan *Marginal Propensity to Labour* (MPL) yaitu total nilai produksi suatu lapangan usaha dibagi dengan penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut. Jika nilai MPL >1 menunjukkan bahwa

penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut, dapat dinyatakan produktif. Sebaliknya, jika $MPL < 1$ maka tidak produktif. Semakin tinggi nilai MPL pada suatu sektor atau lapangan usaha akan menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja pada sektor tersebut lebih produktif. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi maka diperlukan peningkatan nilai IPM.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode *desk research* yaitu menganalisis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah yang dirilis secara resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan beberapa asumsi yang rasional, guna menentukan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2015-2045 (BPS, 2015), diperkirakan pada 2020 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 5.125.622 jiwa terdiri dari laki-laki 2.488.813 jiwa dan perempuan 2.636.809 jiwa dengan rasio jenis kelamin 94,39 dan laju pertumbuhan penduduk 1,14%. Sementara berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020, menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 5.320.092 jiwa terdiri dari laki-laki 2.656.208 jiwa (49,93%) dan perempuan 2.663.884 jiwa (50,07%), dengan laju pertumbuhan penduduk (tahun 2010-2020) mencapai rata-rata 1,63% dan sex ratio mencapai 99,71 atau sudah cukup seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Poyeksi dan Hasil Sensus Penduduk 2020

No	Indikator	Proyeksi	Sensus
1.	Penduduk Laki-laki	2.488.813	2.656.208
2.	Penduduk Perempuan	2.636.809	2.663.884
	Total Penduduk	5.125.622	5.320.092
3.	Rasio jenis kelamin	94,39	99,71
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,14%	1,63%
5.	Dependency Ratio	49,20	48,66

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa antara proyeksi dan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, terdapat penyimpangan jumlah penduduk sebesar 194.470 sedangkan LPP menyimpang 0,49%. Menurut Boediono dalam Tarigan (2014), pertumbuhan penduduk yang tinggi harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar kesejahteraan menjadi nyata. Pertambahan penduduk akan memperluas pasar

karena akan meningkatkan konsumsi, yang berarti akan mendorong peningkatan produksi, namun jika tidak disertai dengan peningkatan produktivitas maka pertambahan penduduk akan menjadi menjadi beban negara.

Luas daratan NTB mencapai 20.153,20 km² sehingga kepadatan penduduk akan mencapai 264 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata NTB masih tergolong jarang (3.788 m² untuk setiap penduduk NTB). Persoalannya adalah tidak seluruh wilayah NTB merupakan kawasan budidaya yang dapat digunakan sebagai tempat usaha atau tempat permukiman, dikarenakan kondisi topografis yang mengharuskan menjadi kawasan lindung dan kawasan konservasi.

Jumlah penduduk NTB sesungguhnya masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain terutama pulau Jawa dan Bali. Persoalan kuantitas penduduk adalah persebaran penduduk yang masih belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada pulau Lombok dibandingkan dengan pulau Sumbawa yang mempunyai luas wilayah lebih besar. Akibatnya, pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk pulau Sumbawa, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Th 2020

Kabupaten/Kota	Tahun Sensus		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	2010 (Jiwa)	2020 (Jiwa)	
Kab.Lobar	599.986	721.481	668,57
KLU	200.072	247.400	274,50
Kab.Loteng	860.209	1.034.859	790,65
Kab.Lotim	1.105.582	1.325.240	752,76
Kota Mataram	402.843	429.651	8.086,15
Pulau Lombok	3.168.692	3.758.631	756,86
Kab. Sumbawa	415.789	509.753	69,46
Kab. Dompu	218.973	236.665	110,09
Kab. Bima	439.228	514.105	112,36
KSB	114.951	145.798	82,43
Kota Bima	142.579	155.140	793,84
Pulau Sumbawa	1.331.520	1.561.461	99,77
NTB	4.500.212	5.320.092	263,98

Sumber : Hasil Sensus Penduduk NTB 2020.

Struktur penduduk pada tahun 2020 didominasi oleh usia produktif sebesar 67,27% yaitu kelompok umur 15-64 tahun, sedangkan kelompok umur usia tidak produktif (<15 dan 65 tahun ke atas) mencapai 32,73%. Sementara itu penduduk dengan usia anak (<19 tahun) mencapai 1.911.175 jiwa (35,92%). Hal ini menunjukkan bahwa *Dependency Ratio* (rasio ketergantungan) sudah mencapai 48,66 atau dengan kata lain setiap 1 orang usia nonproduktif akan ditanggung oleh 2 orang usia produktif.

Dependency Ratio tersebut sudah mencapai bonus demografi yang ditandai oleh nilai *Dependency Ratio* <50 (Menko Kesra, 2012). Bonus demografi akan menjadi bermakna jika *windows of opportunity* dapat diraih sehingga tidak menjadi beban bagi negara.

Jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 1-2 dekade, usia anak akan menjadi generasi dengan tenaga produktif yang akan menentukan masa depan suatu daerah. Penyiapan menjadi tenaga produktif harus mulai melalui pendidikan yang sesuai sehingga pada saatnya akan menjadi tenaga yang mempunyai kompetensi dan mampu meningkatkan produktivitas.

Tabel 3. Struktur Penduduk Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Penduduk (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	0 – 4	506.146	9,51
2.	5 – 9	515.888	9,70
3.	10 – 14	449.950	8,46
4.	15 – 19	439.191	8,26
5.	20 – 24	448.401	8,43
6.	25 – 29	442.640	8,32
7.	30 – 34	440.211	8,27
8.	35 – 39	415.326	7,81
9.	40 – 44	386.029	7,26
10.	45 – 49	337.977	6,35
11.	50 – 54	277.759	5,22
12.	55 – 59	223.715	4,21
13.	60 – 64	167.432	3,15
14.	65 - ke atas	269.427	5,06
	Jumlah	5.320.092	100,00

Sumber : BPS NTB, 2021

Kualitas penduduk diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan nilai yang terus meningkat, namun demikian masih belum mampu mengangkat peringkat yang lebih tinggi. Posisi IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 masih berada pada peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia, meskipun pada tahun 2020 telah mengalami peningkatan sebesar 0,11. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Nilai IPM berasal dari 3 komponen utama yaitu Pendidikan yang diindikasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); Kesehatan yang diindikasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan Ekonomi yang diindikasikan oleh Daya Beli masyarakat (Menko Kesra, 2012). Akumulasi dari ketiga komponen tersebut akan membentuk nilai IPM yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil-

hasil pembangunan serta kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Untuk meningkatkan nilai IPM, maka pemerintah perlu mendorong pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui kebijakan dan strategi yang tepat. Kualitas SDM yang tinggi sudah menjadi keharusan agar pencapaian bonus demografi dapat disertai dengan peningkatan produktivitas.

Tabel 3. Nilai IPM Provinsi NTB

No	Komponen IPM	2018	2019	2020
1.	Pendidikan			
	a. HLS (Th)	13,47	13,48	13,70
	b. RLS (Th)	7,03	7,27	7,31
2.	Kesehatan			
	UHH (Th)	65,87	66,28	66,51
3.	Ekonomi			
	Pengeluaran Per Kapita (Rp 1000)	10.284	10.640	10.350
	IPM	67,30	68,14	68,25

Sumber : BPS NTB 2021

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa komponen utama yang masih perlu ditingkatkan adalah pendidikan yaitu dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, karena dengan RLS 7,31 tahun berarti pendidikan hanya mencapai lulusan Sekolah Dasar atau kelas 7 SMP. Daya beli penduduk NTB mempunyai kecenderungan yang terus meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Pendidikan menjadi masalah utama karena peningkatan yang masih relatif rendah meskipun sudah diterapkan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun dan pemberian dana BOS. Sedangkan untuk komponen kesehatan perlu ditingkatkan dengan Germas dan partisipasi masyarakat.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Berdasarkan data kondisi kependudukan, tidak dipungkiri bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Permasalahan umum yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang meliputi terjadinya bonus demografi menyangkut upaya meraih *windows of opportunity*, penurunan LPP, upaya peningkatan pendidikan, perilaku kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesempatan kerja.

a. Bonus Demografi

Struktur penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didominasi oleh usia produktif dengan rasio

ketergantungan sebesar 48,66 menunjukkan bahwa bonus demografi sudah tercapai. Persoalan utamanya adalah bukan pada pencapaian bonus demografi tetapi bagaimana upaya meraih *windows of opportunity*. Penduduk dengan usia produktif yang tinggi, jika tidak dibarengi dengan perluasan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja, maka tetap akan menjadi beban negara (LIPI, 2013). Disamping itu, berdasarkan struktur umur penduduk NTB (tabel 3), dapat diprediksi bahwa dalam kurun waktu 1-2 dekade mendatang akan terjadi ledakan generasi muda yang memasuki usia produktif.

- b. Pengaturan Angka Kelahiran
Angka fertilitas akan sangat menentukan bagi laju pertumbuhan penduduk (LPP). Hasil SP 2020, ditemukan bahwa LPP yang mencapai 1,63%, lebih tinggi dari rata-rata Nasional yang mencapai 1,25%. Hasil survey SDKI (2017), menunjukkan bahwa TFR Provinsi NTB mencapai 2,56. Angka ini menunjukkan rata-rata seorang anak pada usia subur mempunyai potensi melahirkan sebanyak 2-3 bayi. Penurunan LPP memerlukan kerja keras dan koordinasi berbagai pihak karena menyangkut kesadaran masyarakat dalam menjarangkan dan membatasi angka kelahiran.
- c. Pendidikan
IPM ditentukan oleh komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Salah satu upaya peningkatan IPM adalah dengan meningkatkan pendidikan. Persoalan utama pendidikan adalah peningkatan rata-rata lama sekolah. Meskipun sudah ada kebijakan wajib belajar 12 tahun dan penyediaan dana BOS namun dengan keterbatasan sarana, prasarana dan tenaga pengajar akan menjadi kendala tersendiri. Sebaran prasarana sekolah yang masih belum merata pada setiap tingkat pendidikan, menjadi kesulitan dalam mengakses pendidikan.
- d. Kesehatan
Tantangan terbesar di bidang kesehatan adalah menyangkut perilaku masyarakat dalam bidang kesehatan. Kesadaran penduduk untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kondisi sanitasi di berbagai permukiman penduduk yang masih belum memadai dan budaya hidup bersih dan sehat agar tidak rentan terhadap berbagai macam penyakit. Penataan sanitasi diharapkan akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Masa pandemi Covid 19 mengajarkan agar selalu berperilaku hidup bersih, serta mencegah penularan yang lebih luas dengan mematuhi protokol kesehatan.
- e. Kesempatan Kerja, Pengangguran dan Kemiskinan

Untuk menekan jumlah pengangguran, kunci utamanya adalah membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha yang semakin luas, sekaligus akan mengatasi masalah kemiskinan. Munculnya investasi-investasi besar di berbagai bidang usaha, diperkirakan akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha baru yang cukup luas. Keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*foreward*) dari sebuah investasi akan menciptakan usaha baru yang lebih besar sehingga perekonomian diyakini akan bergerak lebih cepat. Hal ini secara tidak langsung juga akan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

- f. Kepadatan Penduduk
Permasalahan utama dalam kuantitas penduduk adalah kepadatan penduduk yang masih belum merata antar pulau. Pulau Lombok yang luasnya 24% dari wilayah daratan NTB ditempati 70% penduduk sedangkan pulau Sumbawa dengan luas 76% ditempati 30% penduduk. Ketimpangan jumlah penduduk ditunjukkan oleh kepadatan yang sangat jauh berbeda yaitu pulau Lombok mempunyai kepadatan penduduk 756,86 jiwa/km² dan pulau Sumbawa hanya 99,77 jiwa/km².
- g. Mobilitas
Mobilitas penduduk yang digambarkan pada migrasi antardaerah dan antarnegara menunjukkan bahwa penduduk yang keluar NTB lebih banyak daripada penduduk yang masuk ke NTB. Hal ini disebabkan adanya ekspektasi ekonomi pada daerah tujuan dan ketidaksesuaian dengan daerah asal, sehingga penduduk harus keluar daerah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Lapangan pekerjaan yang tersedia dalam daerah, banyak dilakukan oleh penduduk dari luar daerah karena tuntutan keahlian terutama pada sektor pertambangan, pariwisata dan usaha pertanian yang lebih modern.

KONDISI YANG DIINGINKAN

Kondisi yang diinginkan merupakan kondisi ideal yang sesuai dengan kemampuan wilayah, sehingga diperoleh kenyamanan, keserasian serta keselarasan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan keruangan yaitu besaran luas wilayah yang mampu ditempati penduduk. Tidak ada standar yang tepat untuk jumlah penduduk per satuan luas, sehingga digunakan asumsi-asumsi untuk kepadatan penduduk rata-rata, yaitu 250 jiwa/km², 300 jiwa/km² dan 350 jiwa/km². Kondisi kepadatan penduduk NTB saat ini sudah mencapai 264 jiwa/Km² dengan jumlah penduduk 5.320.092 Jiwa.

- a. Jumlah penduduk NTB yang sesuai daya tampung dan daya dukung berkisar antara 250-350 jiwa/km². Jika menggunakan asumsi 250 jiwa/km² maka jumlah penduduk ideal mencapai 5.038.300

jiwa, jika asumsi 300 jiwa/km² maka jumlah penduduk ideal mencapai 6.045.960 jiwa, sedangkan jika menggunakan asumsi 350 jiwa/Km² maka jumlah penduduk akan mencapai 7.053.620 jiwa. Jumlah penduduk tersebut sudah mencapai angka ideal berdasarkan keruangan. Untuk mencapai kondisi jumlah penduduk yang ideal maka diperlukan pengendalian penduduk melalui penurunan LPP, penjarangan dan pengaturan angka kelahiran.

- b. Pemerataan jumlah penduduk antarpulau. Untuk menjaga keseimbangan penduduk berdasarkan keruangan maka perlu ada keselarasan antara ruang dengan jumlah penduduk. Untuk menuju keseimbangan, maka diperlukan penyesuaian antara luas dan jumlah penduduk. Pulau Lombok dengan luas wilayah daratan 24%, seharusnya ditempati oleh 24% jumlah penduduk. Demikian pula untuk pulau Sumbawa dengan luas 76%, seharusnya ditempati 76% penduduk.
- c. Bonus demografi yang sudah dicapai harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang luas, sehingga tingginya angkatan kerja akan menjadi lebih produktif. Dengan demikian *windows of opportunity* dapat diraih dan tidak menjadi beban bagi negara. Prinsip dalam meraih *windows of opportunity* adalah meningkatkan produktivitas rata-rata penduduk dengan membuka lapangan kerja yang luas.
- d. Peningkatan IPM yang tinggi dan mengarah pada posisi menengah diantara Provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu meningkatkan pendidikan melalui RLS, peningkatan kesehatan dengan meningkatkan UHH dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.

STRATEGI KEPENDUDUKAN

Strategi dan program pembangunan kependudukan pada masa mendatang yang perlu dilakukan:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk. Jumlah penduduk perlu diseimbangkan dengan kondisi keruangan yang tersedia. Untuk itu diperlukan program yang mengarah pada :
 - Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui kampanye dan pelayanan KB yang masif, penyuluhan dan pelayanan KB, dan penurunan fertilitas;
 - Revitalisasi Posyandu, dengan meningkatkan fungsi Posyandu yang mampu melayani seluruh tingkatan anggota keluarga (bayi, ibu hamil, remaja dan lansia);
 - Menekan perkawinan anak dengan menegakan peraturan perundangan, penjarangan kehamilan dan pendewasaan usia

perkawinan pada tingkat kesiapan fisiologis dan ekonomi.

- b. Pemerataan penduduk dilakukan dengan mendorong migrasi pada wilayah berpenduduk padat (pulau Lombok) ke wilayah dengan penduduk yang lebih jarang (pulau Sumbawa). Strategi yang digunakan antara lain :
 - Pemerataan pembangunan terutama yang menyangkut infrastruktur dan fasilitas sehingga tidak terjadi ketimpangan;
 - Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di pulau Sumbawa, sehingga akan menarik migrasi penduduk dari pulau Lombok;
 - Transmigrasi dengan prioritas penduduk pulau Lombok dengan membuka wilayah permukiman baru yang dilengkapi sarana dan prasarana dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi).
- c. Pemanfaatan bonus demografi, melalui penyediaan lapangan kerja baru dan kawasan permukiman yang mendukung, melalui :
 - Membuka investasi baru sesuai dengan potensi yang tersedia dan mempercepat operasionalisasi yaitu pertambangan, perminyakan, pengolahan bahan tambang, pengembangan *food estate*, pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang banyak tersedia di pulau Sumbawa;
 - Meningkatkan sikap mental kewirausahaan secara mandiri melalui pengolahan hasil-hasil pertanian dan bahan baku lokal lainnya;
 - Mengembangkan pariwisata sesuai dengan potensi yang tersedia meliputi laut, pantai, budaya, pegunungan, dengan tetap memegang budaya masyarakat setempat.
- d. Peningkatan IPM sebagai akumulasi dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peningkatan aspek pendidikan akan dilakukan melalui upaya peningkatan rata-rata lama sekolah, melalui :
 - Penerapan wajib belajar 12 tahun dengan memberikan fasilitasi dana BOS (biaya operasional sekolah), mengembangkan literasi, kemudahan akses pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain;
 - Pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu sehingga dapat melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi;
 - Kampanye dan penyuluhan pentingnya pendidikan dengan sasaran pada anak sekolah dan orang tua.
- e. Peningkatan kesehatan, ditujukan untuk meningkatkan UHH, menjaga kesehatan bayi, menekan angka kelahiran, melalui :
 - Memperbaiki status gizi masyarakat, kesehatan masyarakat melalui kampanye gemas,

menjaga pola hidup bersih dan sehat serta memperbaiki pelayanan kesehatan. Upaya menjaga kesehatan harus menjadi kebutuhan bersama dan menjadi upaya bersama, serta tidak hanya tergantung pada tenaga kesehatan semata.

- Menekan penyebaran penyakit melalui pencegahan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) serta menjaga kesehatan lingkungan;
 - Memanfaatkan Posyandu, Puskesmas dan Pustu serta optimalisasi sarana kesehatan, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, kunjungan tenaga medis, dan lain-lain.
- f. Pembangunan infrastruktur yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan kemudahan akses wilayah, meliputi :
- Pemerataan sarana dan prasarana sekolah, yang mampu melayani pendidikan pada berbagai tingkatan, fasilitas umum yang dapat dijangkau masyarakat luas, serta penyiapan sarana yang mampu menarik investasi.
 - Peningkatan akses kesehatan berupa sarana, prasarana serta tenaga medis sehingga memungkinkan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat.
 - Mengembangkan infrastruktur yang mendukung investasi sebagai daya tarik berlangsungnya mobilitas penduduk.
- g. Mendorong investasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan potensi wilayah, meliputi pertambangan, perminyakan, pariwisata dan pertanian dengan mengarahkan pada :
- Kemudahan perizinan dengan prinsip mudah, murah dan transparan serta memberi kepastian atas waktu dan legalitasnya;
 - Pengembangan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan bidang investasi dengan prioritas pada penggunaan tenaga kerja lokal.
 - Lapangan usaha yang terkait dengan bidang usaha (*backward* dan *foreward*) disertai penyiapan tenaga lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Kondisi kependudukan akan sangat menentukan bagi kondisi suatu daerah sehingga perlu direncanakan dalam dokumen yang dapat dijadikan pegangan semua pihak. Pembangunan kependudukan harus dilakukan bersama yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Tantangan utama dalam pembangunan kependudukan adalah pemanfaatan bonus demografi

sehingga *windows of opportunity* dapat diraih, peningkatan produktivitas seiring meningkatnya tenaga kerja produktif sehingga tidak menjadi beban bagi negara, peningkatan IPM dengan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, peningkatan pendapatan masyarakat dengan membuka pusat-pusat ekonomi baru meliputi sektor pertambangan, perminyakan, pariwisata, pertanian, dan lain-lain, pemerataan penduduk dilakukan dengan mendorong migrasi secara mandiri dan transmigrasi yang difasilitasi oleh pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial serta kesempatan untuk berdiskusi secara maraton kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi NTB
2. Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB
3. Kepala BKKBN Perwakilan NTB

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsyad, Lincolin. 2020. Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
2. BPS. Statistik Indonesia. 2020. Jakarta.
3. BPS Provinsi NTB. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. Source Url: <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.
4. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. NTB dalam Angka, 2021. Mataram.
5. BPS. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. 2015. Jakarta.
6. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. 2012. Jakarta.
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2019-2023. 2020. Mataram.
8. Jakarta. <https://www.worldometers.info/> Elaboration of data by United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2019 Revision. (Medium-fertility variant).
9. LIPI. Dekade 2020-2030, Indonesia Alami The Window of Opportunity. 2013. <http://lipi.go.id> › berita › single › Dekade-2020-2030-Ind...
10. Tarigan, Robinson. 2014. Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.